

EFISIENSI APBN 2025, PETAKA SEKTOR PENDIDIKAN



**DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
BULELENG**

Merdeka!!

GmnI Jaya!

Marhaen Menang!

Om Swastyastu,

Implementasi Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengharuskan berbagai kementerian dan lembaga melakukan peninjauan ulang anggaran, termasuk di bidang pendidikan. Kemendiktisaintek mengalami pengurangan anggaran dari Rp56,6 triliun menjadi Rp42,3 triliun, sementara Kemendikdasmen berkurang dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,2 triliun. Pemotongan anggaran di sektor pendidikan ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, pendidikan yang dinilai sebagai pilar penting generasi masa depan, justru berpotensi terganggu jika anggaran dipangkas. Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp724,262 triliun, 20% dari total belanja APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,31 triliun.

e^x Mendikti Sainstek Satrio Soemantri Brodjonegoro mengatakan biaya kuliah berpotensi akan naik imbas dari efisiensi anggaran. Hal tersebut bisa terjadi jika pemerintah benar-benar memotong anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 50 persen. Lebih lanjut, pemotongan BOPTN berdampak pada pemangkasan dana penelitian untuk dosen. Dana penelitian yang terbatas akan membuat para dosen memiliki ruang topik yang lebih sempit untuk diteliti dan menerapkan metodologi yang berbiaya rendah.

Terdapat inkonsistensi antara janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan pendidikan dengan kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Pemerintah justru menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pendukung, bukan yang utama. Program makan bergizi gratis yang dipandang sebagai investasi masa depan seharusnya tidak mengorbankan anggaran pendidikan. Sementara itu, perguruan tinggi dipaksa mencari pendanaan alternatif.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia Keempat, disebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang tidak dapat diingkari. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya”.

Sebagai studi komparasi, Vietnam tengah melakukan efisiensi besar-besaran dalam birokrasinya. Upaya penghematan anggaran dilakukan dengan memangkas jumlah kementerian/lembaga serta pengurangan jumlah PNS di negara tetangga Indonesia itu. Semua lembaga, termasuk kepolisian dan militer, akan mengalami pemangkasan besar-besaran. Sebagai gambaran, dari 30 kementerian/lembaga di Vietnam, nantinya hanya disisakan 22. Sedangkan di Indonesia pemerintah malah menambah jumlah kementrian dan lembaga. Efisiensi lebih baik dimulai dari perampangan kabinet seperti di Vietnam.

Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, Jepang berada dalam kehancuran yang tak terbayangkan, ditengah keruntuhan dan ketidakpastian, Kaisar Hirohito mengajukan pertanyaan yang menggugah hati, “Berapa jumlah guru yang tersisa?”. Pertanyaan ini mencerminkan pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, bahkan disaat-saat paling kelam. Guru dan Dosen bukan hanya penyampai ilmu, tapi juga penjaga moral dan harapan. Mereka adalah fondasi untuk membangun kembali masyarakat yang hancur. Pendidikan adalah senjata paling penting untuk masa depan negara.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dengan ini kami Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Buleleng menuntut!

1. Meminta pemerintah untuk mengkaji kembali efisiensi anggaran di sektor pendidikan agar kedepannya tidak berdampak pada kenaikan biaya pendidikan.
2. Berkomitmen untuk tidak mengurangi anggaran beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa
3. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.
4. Membayarkan tukin dosen yang belum dilunasi.

Adapun tuntutan tambahan yang selalu kami perjuangkan yaitu:

1. Sahkan RUU Perampasan Aset.

Demikian penyampaian aspirasi kami agar dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian sikap kami.

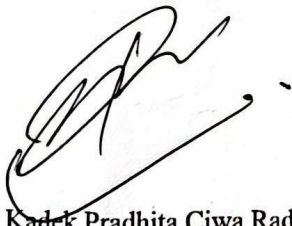
Merdeka!

GmnI Jaya!

Marhaen Menang!

Ketua

DPC GmnI Buleleng,



I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya

Koordinator,



I Kadek Julio Anggadika Putra

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng



(Nyai Wandia Ali)
wk ketua I